

**VIGILANTISME, PREMANISME DAN TEOLOGI PUBLIK:
Studi atas Penutupan GKI Pos Palagan Yogyakarta**

TESIS



Disusun oleh
Simon Sarbunan
NIM: 50160017

Program Studi Magister Filsafat Keilahian
Fakultas Teologi
Universitas Kristen Duta Wacana
Yogyakarta

2019

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul:

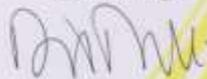
**VIGILANTISME, PREMANISME DAN TEOLOGI PUBLIK:
STUDI ATAS PENUTUPAN GKI POS PALAGAN YOGYAKARTA**

Telah diajukan dan dipertahankan oleh:

Simon Sarbunan (50160017)

Dalam ujian Tesis Program Studi Pasca Sarjana (S2) Ilmu Teologi
Universitas Kristen Duta Wacana untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelar Magister Teologi pada Senin, 09 September 2019

Pembimbing I



(Pdt. Dr. Djoko Prasetyo Adi Wibowo)

Pembimbing II



(Pdt. Handi Hadiwitanto, Ph.D)

Dewan Penguji:

1. Pdt. Dr. Djoko Prasetyo Adi Wibowo



2. Pdt. Handi Hadiwitanto, Ph.D

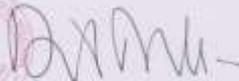


3. Prof. Dr. J.B. Banawiratma



Disahkan Oleh:

Kaprodi S2 Ilmu Teologi dan KKP
Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta



(Pdt. Dr. Djoko Prasetyo Adi Wibowo)

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Simon Sarbunan

NIM : 50160017

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul :

VIGILANTISME, PREMANISME DAN TEOLOGI PUBLIK: STUDI ATAS PENUTUPAN GKI POS PALAGAN YOGYAKARTA

Adalah karya saya sendiri dan bahwa catatan informasi yang saya pergunakan sesuai dengan makna aslinya. Apabila kelak kemudian hari terbukti bahwa karya tulis ini merupakan salinan karya tulis orang lain, saya bersedia melepaskan gelar keserjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 09 September 2019



Simon Sarbunan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti haturkan kepada Tuhan Yesus, atas berkat dan anugerahnya, penelitian ini dapat selesai dengan judul “Vigilantisme, Premanisme dan Teologi Publik: Studi atas Penutupan GKI Pos Palagan Yogyakarta”. Penelitian ini merupakan satu kajian yang melihat fenomena vigilantisme dengan perspektif teologi publik terhadap kasus penutupan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pos Palagan Yogyakarta. Secara empiris, Indonesia yang dikenal sebagai salah satu negara multikultural, gesekan identitas di masyarakat tak terhindarkan. Pasca reformasi 1998, Indonesia memasuki babak baru demokratisasi di berbagai bidang kehidupan yang sebelumnya terkekang oleh rezim Orde baru. Demokratisasi itu, pada satu segi berdampak positif bagi kehidupan, namun di sisi lain memiliki sisi gelap. Salah satu yang dapat kita saksikan adalah menjamurnya kelompok-kelompok berbasis politik dan agama yang memaksakan kehendaknya di ruang publik, yang pada akhirnya menimbulkan konflik horisontal di masyarakat. Persoalan ini nyata dalam bentuk vigilantisme dan premanisme, salah satunya yang terjadi dalam kasus penutupan GKI Pos Palagan Yogyakarta yang dilakukan oleh Front Jihad Islam (FJI).

Penelitian ini mencoba melihat persoalan vigilantisme, premanisme dan teologi publik. Diharapkan dalam penelitian ini, dapat memberikan informasi baru untuk memperkaya kajian-kajian di bidang teologi agama-agama dan teologi praktis. Penelitian ini menemukan bahwa, aksi penutupan GKI Pos Palagan, yang dilakukan oleh Front Jihad Islam (FJI) merupakan bentuk vigilantisme. Vigilantisme ini, tumpang tindih dengan premanisme, karena pihak FJI meminta uang kepada pihak gereja. Oleh karena itu, perlu dibangun teologi publik dalam masyarakat majemuk, yaitu teologi dalam dialog lintas agama-agama dan dialog dengan masyarakat sipil lainnya untuk menciptakan kebaikan bersama (*common good*). Hal itu, diupayakan dalam dialog profetik, yang menganggap orang lain sebagai patner setara dalam dialog. Gagasan, dialog profetik ini merupakan paradigma *Missio Dei*, di mana mencari jejak-jejak keterlibatan Allah dalam masyarakat dan bekerjasama dengan mereka untuk membangun Kerajaan Allah. Atau dengan kata lain membangun teologi Kerajaan Allah.

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada para pihak yang selama ini telah membantu dan memberikan dukungan baik moril dan dana kepada saya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan belajar dan berkarya di kampus tercinta ini.
2. Pembimbing saya dalam tesis ini yaitu Dr. Kees de Jong dan Pdt. Dr Djoko Prasetyo yang selama ini membantu saya dalam penyusunan penelitian ini. Saya menyadari tanpa masukan dan arahan mereka penelitian ini tidak dapat diselesaikan dengan baik
3. Para dosen-dosen Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, yang sudah menjadi guru dan inspirator dalam membantu saya dalam mempertajam rasa berteologi kontekstual.
4. Kedua orang tua saya yaitu alm Alberth Sarbunan dan alm Margaretha Maskikit, yang walaupun mereka sudah tidak ada di dunia ini lagi, tetapi merekalah yang selalu menjadi kebanggaan saya. Semoga mereka tersenyum di surga.
5. Kedua saudara saya, Oktovina Sarbunan dan Selvianus Sarbunan yang selama ini telah membantu dan menjadi saudara yang dalam suka dan duka.
6. Pdt. Diana Chaterina Simanjuntak, M.Th yang sudah menjadi kekasih hati saya, sudah sabar dan mendukung penulis dalam berbagai hal, sehingga penelitian ini bisa selesai.
7. Pdt. Andrew Hendro dan Pdt. Lukas Edy Srihastomo selaku pimpinan Gereja Kasih Kristus Indonesia (GKKI-IBC) Yogyakarta yang sudah memberikan kesempatan dan memberikan dukungan dana kepada saya untuk melanjutkan studi pasca sarjana teologi.
8. Semua jemaat GKKI-IBC Yogyakarta yang sudah menjadi keluarga saya di Yogyakarta.
9. Pimpinan dan Jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pos Palagan Yogyakarta yang sudah memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian di gereja ini, dan bekerjasama dengan baik sehingga penelitian ini bisa selesai.
10. Jason Ambarita dan semua saudara-saudara di Medan yang telah membantu memberikan dukungan dana kepada saya dalam menyelesaikan studi ini.
11. Dr. Nikolaus Powell Reressy yang sudah mengajari saya dalam menulis dan membangun logic riset. Dengan bantuan dan motivasi yang beliau berikan, penulis sangat terbantuan dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Semua teman-teman seperjuangan di pasca sarjana (S2) fakultas Teologi Univeristas Kristen Duta Wacana Yogyakarta : kak Wilda, Sampoi, dek Lidia, kak Hugo, kak Irwan, kak Dinka, kak Bily, kak Andi, kak Makmur, dek Vania,

Michel, dek Ela, Argo, dek Nopry, dek Kristin, dek Ekle, dek Nino, dek Nathalia, dek Deby dan dek Yodi. Kalian semua sudah menjadi sahabat dalam perziarahan studi di Fakultas Teologi ini.

13. Semua teman-teman HIKMA (Himpunan Keluarga dan Mahasiswa) Tanimbar Yogyakarta, di mana telah menjadi tempat saya untuk berkarya dan mengembangkan potensi.

Semoga penelitian ini, dapat bermanfaat bagi semua orang sesuai konteksnya masing-masing. Akhirnya, hanya oleh Anugerah Allah, pertolongan Tuhan Yesus dan penghiburan dan tuntunan Roh Kudus sajalah saya dimampukan dalam kehidupan ini.

Prada Coffee Yogyakarta,
Simon Sarbunan

©UKDWN

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM.....	xii
DAFTAR ISTILAH	xiii
BAB I 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Landasan Teori	7
1.6 Metode Penelitian.....	8
1.7 Judul.....	11
1.8 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TEOLOGI PUBLIK & FENOMENA VIGILANTISME	13
2.1 Diskursus Teologi Publik	13
2.1.1 Apa itu Teologi Publik?	14
2.1.2 Mengapa Membutuhkan Teologi Publik?.....	20
2.2 Teologi Publik John W. de Gruchy	25
2.3 Teologi Publik David J. Bosch	29
2.4 Fenomena Vigilantisme	36
2.4.1 Unsur Perencanaan.....	36
2.4.2 Dilakukan oleh pribadi otonom dan warga otonom.....	37
2.4.3 Penggunaan kekuatan dan/atau kekerasan (terancam).....	38
2.4.4 Respons terhadap penyimpangan.....	39
2.4.5 Keamanan pribadi/kolektif.....	43
BAB III AKSI PENUTUPAN GEREJA SEBAGAI VIGILANTISME.....	45
3.1 Aksi Penutupan GKI Pos Palagan	45
3.1.1 Tuntutan FJI	49
3.1.2 Tanggapan Gereja atas Tuntutan FJI.....	50
3.1.3 Peta Aktor dalam Aksi Penutupan GKI Pos Palagan.....	54
3.1.4 Artikulasi Kepentingan FJI	55
3.2 Aksi Penutupan Gereja Sebagai “Vigilantisme-Premanisme”	60

3.3 Vigilantisme di Indonesia	65
BAB IV TEOLOGI PUBLIK KONTEKSTUAL	70
4.1 Tinjauan atas Praksis Teologi Publik GKI Pos Palagan	70
4.2 Teologi Publik Kontekstual Sebagai Teologi Interkultural	75
4.2.1 <i>Missio Dei</i> sebagai Paradigma Teologi Publik	77
4.2.2 Dialog Profetik	80
4.3 Konstruksi Teologi Publik Kontekstual GKI Pos Palagan.....	83
4.3.1 Memperkuat <i>Civil Society</i>	84
4.3.2 Menyambut Orang Asing	91
4.3.3 Dari Permusuhan ke Hospitalitas	95
4.3.4 Dialog Kehidupan dengan Kelompok Vigilantisme	97
BAB V PENUTUP.....	101
5.1 Kesimpulan	101
5.2. Rekomendasi.....	104
5.3. Keterbatasan Penelitian	105
5.4. Peluang untuk Penelitian Selanjutnya	105
DAFTAR PUSTAKA	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix

©UKDW

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Liberation Theologies & Public Theology (Kim, 2017:13).....	18
Tabel 2. 2 Liberation Theologies, Public Theology, and Missiology	34
Tabel 3. 1 Isu-Isu Kristenisasi (disadur dari Ahnaf & Salim, 2017:6-9)	56
Tabel 4. 1 Deskripsi perpindahan jemaat dari permusuhan ke Hospitalitas	97

©UKDW

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Empat Tugas dari Interpretasi Teologi Praktis (Osmer 2008:11)	11
Gambar 2. 1 Main bodies engaged in the public sphere (Kim, 2011:13)	16
Gambar 3. 1 1 Konstruksi Peta Aktor (dikonstruksi oleh peneliti, 2019).....	54

©UKDW

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

B	
BKSGK	Badan Kerjasama Gereja-gereja se Kabupaten
C	
CRCS-UGM	Center for Religious and Cross-cultural Studies Universitas Gadjah Mada
D	
Depag	Departemen Agama
F	
FJI	Front Jihad Islam
FJR	Forum Jogja Rembung
FKUB	Forum Kerukunan Umat Beragama
FPI	Front Pembela Islam
FUI	Front Umat Islam
G	
GBI	Gereja Baptis Indoneisa
GBK	Gerakan Pemuda Kabah
GKI	Gereja Kristen Indonesia
GPdI	Gereja Pentakosta di Indonesia
GPM	Gereja Protestan Maluku
H	
HAM	Hak Asasi Manusia
HKBP	Huria Kristen Batak Protestan
HTI	Hizbur Tahlil Indonesia
I	
IMB	Izin Mendirikan Bangunan
K	
Kantipmas	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
L	
LGBT	Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender
MMI	Majelis Mujahidin Indonesia
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
N	
NU	Nahdlatul ‘Ulama
S	
Sembako	Sembilan Bahan Pokok
SKB	Surat Keputusan Bersama

DAFTAR ISTILAH

Perikoretik	Tarian Tritunggal Allah, di mana mereka saling terhubung dan saling meresap, tetapi tidak saling memengaruhi.
Vigilantisme	<i>Establishment violence</i> : mempertahankan sesuatu dengan menggunakan cara-cara kekerasan untuk melindungi atau mendapatkan kembali apa yang dimiliki.
Diakonia Karitatif	Suatu bantuan yang diberikan secara langsung yang merefleksikan belas kasih Allah kepada orang-orang yang menderita.
Diakonia Transformatif	suatu bantuan yaitu tidak hanya memperlihatkan belas kasihan pada korban, tetapi mencegah agar jangan sampai terjadi korban-korban baru
Ghetto	Adalah istilah untuk tempat tinggal warga Yahudi, istilah ini dipakai pada abad ke-16 dan ke-17. Ghetto sering dikaitkan sebagai perlambangan diskriminasi.
Apartheid	(arti dari bahasa Afrikaans: apart memisah, heid sistem atau hukum) adalah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan dari sekitar awal abad ke-20 hingga tahun 1990.
Repertoire	Adalah daftar atau persediaan drama, opera, karya, atau bagian yang dipersiapkan oleh perusahaan atau orang. Dalam hal ini, repertoire merupakan inventaris, atau sesuatu yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh satu orang atau kelompok tertentu sehingga sudah menjadi kebiasaan.

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Topik penelitian ini adalah tentang peran gereja di ruang publik, yang berfokus pada penjelasan mengenai fenomena vigilantisme yang terjadi pada kasus penutupan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pos Palagan Yogyakarta. Secara empiris, topik penelitian ini penting untuk dikaji karena vigilantisme yang melibatkan aktor-aktor agama (Rakhmad, 2011:169)¹ merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan dalam realitas masyarakat plural (*plural society*) seperti di Indonesia. Sementara itu, secara teoretis, urgensi penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif teologi publik untuk menjelaskan fenomena vigilantisme yang melibatkan aktor-aktor agama, ketika kajian-kajian mengenai teologi publik masih luas dan menjadi perbincangan menarik dalam diskursus ilmu teologi. Penelitian ini mengambil bagian dalam mempertegas teologi publik itu sendiri.

Pada ranah empiris, dalam hal pluralitas agama, Indonesia memiliki enam agama yang diakui eksistensinya oleh negara yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Di samping hal itu, ada aliran-aliran kepercayaan yang begitu beragam di Indonesia.² Pluralitas agama itu pada satu segi mendorong interaksi, kooperasi, akomodasi, dan akulturasi antara berbagai kelompok masyarakat, tetapi pada segi lain dapat menimbulkan konflik antar umat beragama. Menyoal konflik umat beragama, salah satu indikasi yang muncul di masyarakat adalah fenomena tumbuh suburnya berbagai organisasi kemasyarakatan berbasis agama dan politik pasca Reformasi 1998, yang berujung dan bertindak atas nama kepentingan kelompok yang mengarah pada sikap

¹ Penggunaan istilah aktor-aktor agama di sini mengacu pada pandangan Jalaluddin Rakhmat, yang mengatakan bahwa, aktor agama ialah orang yang dibentuk oleh komunitas agama dan yang bertindak dengan maksud untuk menegakkan, menyebarkan, atau mempertahankan nilai-nilai dan ajaran agamanya. Individu, kelompok, komunitas, atau bahkan negara yang dibentuk oleh dan untuk agama kita masukkan dalam kategori aktor agama. Menurut Rakhmat, ada dua alasan mengapa aktor agama melakukan kekerasan yaitu faktor orientasi agama dan perlakuan tidak adil.

² Selain enam agama yang diakui oleh negara, belakangan penghayat kepercayaan mulai mendapat pengakuan oleh negara salah satunya melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2017 dimana penghayat kepercayaan boleh mencantumkan identitas kepercayaannya dalam kolom agama di kartu tanda penduduk (KTP). Namun, masih menjadi diskusi luas, penganut kepercayaan menginginkan agar kolom agama jangan hanya dicantumkan nama umum "penghayat kepercayaan" saja, tetapi langsung spesifik mencantumkan nama agama asli mereka seperti Sunda Wiwita dan lain-lain. Namun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ingin nama kepercayaan yang dianut para penghayatnya tidak disebutkan secara spesifik di kolom agama KTP. Nama kepercayaan secara spesifik dinilai akan menciptakan implementasi jangka panjang. Baca selengkapnya di artikel "Kemendagri Tak Ingin Nama Penghayat Kepercayaan Ditulis Spesifik", dalam <https://tirto.id/kemendagri-tak-ingin-nama-penghayat-kepercayaan-ditulis-spesifik-czZA>

intoleransi. Sikap intoleransi itu muncul salah satunya dalam fenomena penutupan tempat ibadah. Kasus-kasus yang terjadi beragam dan tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan penelitian Setara Institut, kasus-kasus intoleransi cukup tinggi di Indonesia 11 tahun terakhir ini, yaitu sekitar 2.975 kasus (Ramadhan, 2019). Misalnya saja kasus-kasus besar yang banyak menyita perhatian publik adalah penutupan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin Bogor, Penutupan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia Bekasi, Pembakaran Masjid di Tolikara Papua, Pembakaran Gereja di Aceh Singkil, perusakan Masjid di Tuban dan sejumlah kasus besar lainnya.

Aktor-aktor yang melakukan aksi-aksi itu rata-rata adalah kelompok-kelompok berbasis agama dan politik. Kelompok-kelompok yang menolak ini, menganggap bahwa rumah ibadah di suatu tempat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Aksi-aksi ini sering disebut “vigilantisme”³ yaitu sebuah fenomena kekerasan di ruang publik dan kelompok-kelompok yang melakukan ini biasanya disebut “vigilante”. Vigilantisme ini memiliki sebuah dilema yang *self-contradiction*, yaitu dalam kegiatan para vigilante berusaha menegakkan hukum, namun secara bersamaan melanggar juga hukum yang mereka bela, inilah karakteristik vigilantisme yang bersifat ambigu (Mee dkk, 2015:18). Salah satu bentuk vigilantisme itu nampak dalam peristiwa penutupan tempat ibadah termasuk diantaranya penutupan gereja.

Dalam literatur Internasional yang berpengaruh, terutama Les Jhonson dalam tulisannya “*What is Vigilante*” (1996), menggambarkan vigilantisme sebagai (1) gerakan sosial yang memunculkan tindakan kekerasan yang direncanakan dan hukuman fisik atau ancaman untuk menggunakan kekerasan atau hukuman fisik (2) kegiatan yang muncul sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma yang relatif mapan (terkadang norma yang sudah dilembagakan) (3) tindakan yang difokuskan pada kejahatan dan / atau kontrol sosial dalam bentuk memberikan keamanan kepada anggota sendiri dan anggota yang sudah mapan (sesuai pesanan) (4) kelompok-kelompok yang dianggap (bertindak) di luar kerangka hukum yang ditegakkan oleh negara (lihat juga (Abrahams, 1998). Vigilantisme ini pada dasarnya muncul sebagai reaksi dari masyarakat atas ketidakberdayaan atau keengganan negara dalam menegakkan hukum (Jhonston, 1996:231). Sementara itu, menurut Rosenbaum & Sederberg, (1974:542) vigilantisme

³ Cho Youn Mee dkk mendefinisikan vigilantisme yaitu: pertama, merupakan sebuah fenomena kekerasan; kedua, vigilantisme bangkit berdasarkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam kondisi lemahnya sistem pemberlakuan hukum; ketiga, sifat masyarakat otonom dan merasa bertanggung jawab atas penegakkan hukum maupun tatanan sosial yang telah ada.

adalah *establishment violence*: mempertahankan sesuatu dengan menggunakan cara-cara kekerasan untuk melindungi atau mendapatkan kembali apa yang dimiliki.

Dalam kriminologi, vigilantisme adalah para penyerang yang melakukan tindakan dalam berbagai bentuk, dimana mereka mengambil hukum ke tangan mereka dengan cara kekerasan (Buur & Jensen, 2004:142). Vigilantisme adalah bentuk pengambilalihan tugas polisi (aparatus hukum) sehari-hari (*everyday forms of policing*). Istilah ini sering dikenal dengan “kepolisian informal” (*informal policing*). Menurut Buur & Jensen, mengapa kepolisian informal itu bisa ada di masyarakat, karena negara dianggap tidak tegas atau ragu-ragu dalam menegakkan hukum (Buur & Jensen, 2004:148). Ada prasangka terhadap dwifungsi hukum, sehingga berkonsekuensi pada tindakan vigilantisme. Oleh karena itu, masyarakat merasa harus bergerak sendiri untuk mengadili pelaku kejahatan. Mungkin sampai di sini, kita dapat katakan, vigilantisme sebagai pemaksaan atas nama hukum. Aktor negara bisa saja melakukan vigilantisme, karena ia memiliki otoritas yang diberikan negara. Menjadi persoalan, jika hal itu dilakukan oleh aktor non-negara dalam masyarakat pluralistik di Indonesia.

Di Indonesia, salah satu kota yang sering terjadi aksi-aksi vigilantisme ini adalah Yogyakarta. Data penelitian empiris terbaru yang dilakukan oleh *Center for Religious and Cross-cultural Studies* Universitas Gadjadara - CRCS-UGM (Ahnaf & Salim, 2017:85-105) yang melihat kekerasan terhadap minoritas di Yogyakarta yang dilakukan oleh kelompok-kelompok vigilantisme semakin meningkat. Dari rentang tahun 2014-2019, tercatat ada 11 kasus intoleransi yang menyangkut rumah ibadah umat Kristen diantaranya: Penutupan gereja Isa Almasih-Godean-Sleman, Penutupan paksa gereja Pentakosta di Playen-Gunungkidul, Percobaan pembakaran Gereja Baptis Indonesia di Saman-Bantul, Penolakan pendirian Gereja Kristen Saksi Yehuwa di Baciro-Kota Yogyakarta, Perusakan Gereja Pentakosta Indonesia di Pangukan -Tridadi- Sleman, Penyerangan kegiatan ibadah umat Katolik yang digelar di rumah direktur penerbit buku Galang Press, Julius Felacianus di Ngaglik - Sleman, Penutupan paksa Gereja Kristen Injili di Gunungkidul, Upaya penutupan Gereja Baptis Indonesia (GBI) Saman, Penghentian paksa kegiatan ibadah di Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) Pangukan - Tridadi Sleman, termasuk diantaranya penutupan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pos Palagan (Ahnaf & Salim, 2017:85-105).

Dari rentetan peristiwa-peristiwa itu, yang menjadi perhatian publik Yogyakarta salah satunya adalah penutupan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Ngupasan Pos Palagan (selanjutnya disebut GKI Pos Palagan). Sebagian besar anggota jemaat gereja ini

didominasi oleh orang tua. Menarik bahwa, hubungan gereja dengan masyarakat setempat sudah sangat baik, bahkan ada dukungan dari tokoh-tokoh Muslim yang tinggal di sekitar wilayah gereja. Letak gereja sendiri berada di depan jalan umum, dan tidak mengganggu aktivitas warga. Namun, pada saat gereja ingin mengurus izin pendirian rumah ibadah, protes malah datang dari orang-orang yang bukan berasal dari warga sekitar. Oleh karena itu, GKI Pos Palagan menjadi menarik sebagai tempat penelitian karena dapat menelusuri aktor-aktor agama di Yogyakarta yang selama ini melakukan vigilantisme mengatasnamakan agama.

Pada tahun 2015, GKI Pos Palagan didatangi sekelompok orang dari organisasi Front Jihat Islam (FJI) dan gabungan ormas (organisasi masyarakat) memprotes kegiatan ibadah di situ. Dalam acara sosialisasi yang dilakukan gereja kepada warga sekitar sebagai salah satu persyaratan izin pendirian rumah Ibadah, tiba-tiba mereka datang dan membubarkan pertemuan itu.⁴ Mereka meminta supaya pihak gereja untuk segera menghentikan kegiatan ibadah karena belum mendapatkan izin. Akhirnya pihak Kelurahan (pemerintah) setempat yang sebelumnya sudah memberikan izin secara resmi kepada gereja menarik kembali izin itu karena ada intimidasi dan tekanan dari FJI. Karena ada protes dan intimidasi dari FJI itu, sampai saat ini gereja yang sudah berdiri 12 tahun itu tidak dapat beribadah setiap hari minggu di gedung mereka sendiri dan harus meminjam salah satu sekolah (SD Budya Wacana Yogyakarta) untuk dijadikan tempat beribadah setiap minggu.

Protes yang dilakukan oleh FJI itu, membuat warga sekitar GKI Pos Palagan, yang sebelumnya menerima dengan baik keberadaan gereja itu menjadi takut dan merasa terintimidasi, juga termasuk warga jemaat sendiri. Menurut pengakuan warga setempat, kelompok FJI yang datang itu bukanlah warga di situ, namun mereka berasal dari luar. Bapak Abi Setiawan selaku Ketua GKI Pos Palagan mengaku merasa terintimidasi dan akhirnya memilih untuk tidak berkonfrontasi dengan FJI untuk menghindari bentrok fisik.⁵ Mereka kemudian mengikuti keinginan dari FJI dan memindahkan ibadah hari minggu ke Sekolah Dasar Budya Wacana Yogyakarta.

Sementara itu, urgensi teoretik penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif teologi publik untuk menjelaskan fenomena vigilantisme yang melibatkan aktor-aktor agama, ketika kajian-kajian mengenai teologi publik masih luas dan menjadi

⁴ Wawancara dengan pimpinan GKI pos Palagan Bapak Abi Setiawan (Ketua GKI Pos Palagan) dan Bapak Adreas (Wakil Ketua GKI Pos Palagan/Penatua Gereja) pada 21 Juni 2019

⁵ Wawancara dengan pimpinan GKI pos Palagan Bapak Abi Setiawan (Ketua GKI Pos Palagan) dan Bapak Adreas (Wakil Ketua GKI Pos Palagan/Penatua Gereja) pada 21 Juni 2019

perbincangan menarik dalam diskursus ilmu teologi. Penelitian ini sebagai salah satu upaya mencari kontekstual teologi publik. Teologi publik merupakan pendatang baru atau istilah baru dalam disiplin ilmu teologi. Istilah teologi publik diciptakan oleh Martin Marty dengan merujuk pada karya Reinhold Niebuhr dalam bukunya *Christ and Culture* (Bezuidenhout, 2007:7). Niebuhr memiliki pengaruh penting pada teologi publik (Forrester, 2004:9-10). Apa yang kita ketahui sebagai teologi publik dewasa ini telah berkembang dari teologi pembebasan dan teologi politik tahun 1960-an dan seterusnya (Forrester, 2004:14). Pengaruh Jürgen Moltmann dalam penafsiran ulang atas teologi politik, dan teologi pembebasan Gutiérrez dan yang lainnya telah menjadikan penting kontribusi saat ini (de Gruchy, 2004:48,51).

Walaupun teologi publik merupakan istilah yang relatif baru, namun dalam beberapa tahun terakhir ini, menjadi perhatian di bidang teologi Kristen dan etika. Menurut Bretenberg (2003:66) jika dikaitkan dengan tradisi Kristen, teologi publik bermaksud untuk memberikan interpretasi dan bimbingan yang diinformasikan secara teologis bagi individu, komunitas iman, dan institusi serta interaksi masyarakat sipil, dengan cara yang dapat dimengerti, dinilai, dan mungkin meyakinkan bagi mereka yang ada di dalam gereja, maupun mereka yang ada di luar gereja. Para teolog publik dengan demikian berupaya untuk berkomunikasi, dengan cara yang dapat dipahami dan diuji untuk semua orang, keyakinan dan praktik Kristen dapat dipertanggungjawabkan, baik secara deskriptif maupun preskriptif, tentang kehidupan publik dan kebaikan bersama, dan dengan demikian memberikan kemungkinan untuk mengajak semua orang Kristen maupun non Kristen.

Menurut David John Bromell (2011), teologi publik adalah cara berpikir kritis, dengan orang lain, tentang agama dan kehidupan publik. Teologi publik terhubung dengan, tetapi berbeda dengan teologi pembebasan. Teologi publik mengusung proyek kemanusiaan, tidak hanya Kristen, melainkan bagi konteks yang multi budaya dan agama (Pattipeilohy, 2018:166-173). Yang termasuk teologi publik adalah politik, sosial, budaya, ekonomi dan lain-lain yang meliputi pembelaan terhadap kebebasan, melawan ke sewenang-wenangan negara, pembelaan terhadap kaum miskin dan anarkisme pasar (fundamentalisme pasar), penciptaan harmoni dan hidup komunitas yang terbuka melawan fundamentalisme agama, dan penyelamatan lingkungan hidup (Pattipeilohy, 2018:166-173).

Di Asia misalnya, teologi publik menjadi diskursus teologi bersama dengan agama-agama lain dan kebudayaan-kebudayaan lain yang tidak dapat di klaim milik Kristen

saja. Teologi publik Asian bersifat multi religius dan multi kultural yang justru karena mendapat wawasan (*insight*) dari aneka perjumpaan yang khas Asia, maka teologi bersifat publik dan diarahkan kepada aneka keprihatinan yang khas Asia pula (Pieris, 1980:21-42). Menarik bahwa teologi publik pertama-tama bukan diskursus yang bersifat universal, melainkan dimulai dari ruang-ruang partikular (de Gruchy, 2007:26-41). Walaupun berasal dari konteks partikular yaitu hasil refleksi teologis pada satu konteks tertentu, namun teologi publik menempatkan fokus bahasanya pada hal-hal kepublikan. Hal itu sejalan dengan apa yang dikatakan Preman Niles (1983:44) bahwa karakter dasar semua teologi adalah kepublikan. Dengan kata lain, tidak ada teologi yang tidak bersifat publik. Artinya bahwa, teologi tidak sekadar mengurus hal-hal yang bersifat eskatologis saja, tetapi juga prihatin dan mencari jalan keluar atas persoalan-persoalan riil di masyarakat seperti persoalan-persoalan sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain-lain. Keprihatinan pada lokalitas inilah yang membuat teologi publik menjadi praksis yang kontekstual.

Tepat pada urgensi empiris dan teoretis sebagaimana sudah diuraikan di atas, maka penelitian mengenai aksi penutupan GKI Pos Palagan, yang dilakukan oleh Aktor-aktor agama penting untuk dilaksanakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah (pertanyaan penelitian) yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa makna di balik aksi penutupan GKI Pos Palagan Yogyakarta?
2. Bagaimana teologi publik kontekstual di GKI Pos Palagan Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menemukan makna di balik aksi penutupan GKI Pos Palagan Yogyakarta.
2. Mengkonstruksi teologi publik kontekstual bagi GKI Pos Palagan Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoretis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teologi publik di Indonesia, yang belum banyak tersedia dalam bahasa Indonesia.

- b. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti lain.

Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak gereja-gereja di Yogyakarta khususnya GKI Pos Palagan.
- b. Selain itu, melalui penelitian ini, peneliti dapat memperdalam serta menambah berbagai pengetahuan baru, khususnya yang terkait dengan teologi publik.

1.5 Landasan Teori

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua pemikiran teologi publik yaitu dari Jhon W. de Gruchy dan David J. Bosch. Sementara kerangka teori vigilantisme, peneliti menggunakan pemikiran Les Jhonson tentang vigilantisme. De Gruchy mengusulkan tujuh tesis yang merupakan pusat tugas teologis publik. *Pertama*, praksis teologis publik yang baik tidak berusaha untuk memilih agama Kristen tetapi untuk menyaksikan nilai-nilai yang diyakini orang Kristen sangat penting bagi “kebaikan bersama” (*common good*) (de Gruchy, 2007:39).

Kedua, praksis teologis publik yang baik, membutuhkan pengembangan bahasa yang dapat diakses oleh orang-orang di luar tradisi Kristen, yang selain dapat meyakinkan diri sendiri; tetapi juga perlu ditunjukkan kepada jemaat-jemaat Kristen dalam bahasa di mana debat publik terkait dengan tradisi iman (Bosch, 1982a ; de Gruchy, 2007). *Ketiga*, praksis teologis publik yang baik membutuhkan pengetahuan tentang kebijakan dan isu-isu publik, memahami implikasi dari apa yang dipertaruhkan, dan menjadikan ini sebagai evaluasi analitik yang tajam dan kritik teologis (de Gruchy, 2007). *Ketiga*, praksis teologis publik yang baik membutuhkan pengetahuan tentang kebijakan dan isu-isu publik, memahami implikasi dari apa yang dipertaruhkan, dan menjadikan ini sebagai evaluasi analitik yang tajam dan kritik teologis (de Gruchy, 2007).

Keempat, praksis teologis publik yang baik membutuhkan *doing theology* dengan cara yang bersifat interdisipliner dan menggunakan metodologi di mana konten dan proses yang sedang berlangsung saling terkait (de Gruchy, 2007). *Kelima*, praksis teologis publik yang baik memberikan prioritas pada perspektif korban dan orang-orang yang bertahan (survivors), serta pada pemulihan keadilan (de Gruchy, 2007:39-40).

Keenam, praksis teologis publik yang baik membutuhkan jemaat yang secara sadar dipelihara dan diinformasikan oleh refleksi alkitabiah dan teologis dan kehidupan ibadah yang kaya dalam kaitannya dengan konteks di mana mereka berada, baik secara lokal maupun lebih luas (de Gruchy, 2007:40). *Ketujuh*, praksis teologis publik yang baik, membutuhkan spiritualitas yang memungkinkan pengalaman Allah yang hidup, dengan orang-orang dan dengan ciptaan, yang digerakkan oleh kerinduan akan keadilan dan keutuhan serta perlawanan terhadap semua yang menghalangi kesejahteraan.

Sementara itu, dalam tantangan pluralitas agama seperti di Indonesia, menurut peneliti, paradigma misi yang di tawarkan David J. Bosch menjadi relevan dalam konteks itu. Menurut Storrar (2011:23) paradigma misi Bosch menjadikan kita dapat melihat paradigma publik baru yang beroperasi di bidang teologi publik. Dengan kata lain, melalui misi Bosch, teologi publik benar-benar beroperasi di ruang publik. Untuk mendudukan gagasan Bosch, kita perlu berangkat dari pemahamannya mengenai eklesiologi, yang diringkas dengan istilah “komunitas alternatif”. *Komunitas alternatif* adalah Gereja menemukan dirinya terus-menerus berada di dalam dan bukan dari dunia ini (Bosch, 1975:4). Bagi Bosch, ada dua realitas yang harus dijaga dalam ketegangan yang peka, tetapi sering kali salah satu dari dimensi ini dilupakan. Dalam menjaga ketegangan kreatif inilah Bosch menggunakan konsep Gereja sebagai *komunitas alternatif* (Livingston, 1990:11).

Berangkat dari *komunitas alternatif* dalam misi transformasi Bosch, Johann-Albrecht Meylahn mengelaborasi ide misi dalam melihat tantangan saat ini dengan gagasan yang ia sebut sebagai “mengubah misi sebagai lima gerakan tari menuju komunitas alternatif - Sebuah gereja “di dalam” tetapi tidak “dari” dunia. Lima gerak tari itu adalah: Mendengar (*listening*), menerjemahkan (*interpreting*), penilaian secara bijaksana (*discerning*), gereja liminal (*liminal church*), gereja transformasional (*transformational church*). Lima gerak tari ini, tidak dilihat sebagai sebuah gerak linier, tetapi lebih seperti lingkaran atau spiral.

1.6 Metode Penelitian

Berkaitan dengan metodologi teologi publik, sebagaimana David Tracy mengatakan bahwa, tidak ada satu metode saja yang dapat diterima dalam berteologi dalam teologi publik (dalam Kim, 2017:20). Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan sebagaimana disampaikan di atas, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (studi kasus). Penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan yang

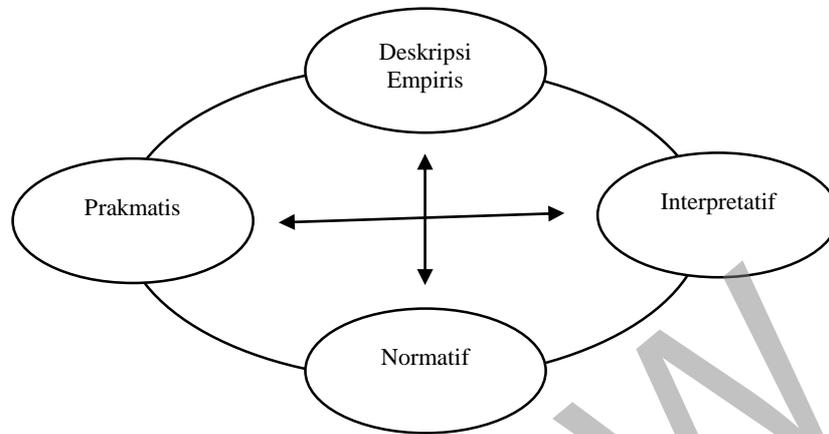
mengeksplorasi dan memahami makna dari individu-individu atau kelompok sebagai masalah sosial atau manusia (Creswell, 2014:32:). Dalam strategi pengumpulan data, peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan pengurus gereja, pendeta dan pihak terkait. Kemudian, akan dilakukan dokumentasi. Sementara dalam analisis data (secara induktif: membangun dari yang khusus ke umum), penelitian ini menggunakan model teologi praktis Richard R. Osmer,⁶ yang berfokus pada empat tugas yaitu: (1) Deskriptif Empiris (*descriptiv-empirical*), (2) Interpretatif (*interpretive*), (3) Normatif (*normative*) dan (4) Pragmatis (*pragmatic*) (Osmer 2008; 2004:150).

- a. Tugas deskripsi empiris berfokus untuk mengumpulkan informasi yang membantu kita membedakan pola dan dinamika dalam episode, situasi, atau konteks tertentu, dan sebagai panduan dalam tugas ini (Osmer, 2008:4; 2004:150). Tugas dari bagian ini berfokus pada hal-hal yang aktual, bagian empiris dari beberapa bentuk praksis keagamaan dalam konteks sosial tertentu. Pertanyaan pada bagian ini adalah apa yang terjadi? Apa yang menjadi bagian dari praksis keagamaan dalam bidang kehidupan tertentu? Bagian ini bertujuan untuk mencari gambaran yang menyeluruh dan mungkin akurat dari sebuah bidang pengalaman tertentu (Osmer 2004:150).
- b. Tugas interpretatif adalah menggambar teori-teori seni dan ilmu pengetahuan untuk lebih memahami dan menjelaskan mengapa pola dan dinamika ini terjadi (Osmer, 2008:4). Bagian ini memiliki tugas untuk menemukan tempat penelitian empiris dalam kerangka penjelasan yang lebih menyeluruh. Pada bagian ini pertanyaannya adalah mengapa itu terjadi? Di sini temuan penelitian terfokus dalam sebuah kerangka yang bergerak memberikan penjelasan tentang pola-pola dari tingkah laku, sikap dan gagasan-gagasan (Osmer 2004:150).

⁶ Richard R. Osmer adalah profesor teologi di Princeton Theological Seminary. Osmer mengakui bahwa, empat tugas teologi praktis yang ia gagas merupakan refleksi-refleksi yang banyak dipengaruhi oleh tiga tokoh utama dalam teologi praktis yaitu Don Browning, Shuck Gerkin, dan Hans van der ven. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua tulisan dari Osmer yaitu: *Practical Theology-An Introduction* (2008) dan Johannes Van der ver's Contribution to The New Consensus in Practical Theology, dalam Chris A.M Hermas & Mary E, Moore (Ed), *Hermeneutics and Empirical Reasearch in Practical Theology* (2004:149-167)

- c. Tugas normatif adalah menggunakan konsep teologi untuk menafsirkan episode-episode, situasi-situasi, atau konteks-konteks tertentu, konstruksi norma etika untuk memandu respons kita, dan belajar dari “praktik yang baik” (Osmer, 2008:4). Bagian ini, memiliki tugas berfokus pada membangun teologi dan norma-norma etika yang dapat menuntun dan memperbaiki beberapa bentuk praksis agama. Pertanyaannya adalah apa bentuk-bentuk teologia praksis yang seharusnya dalam konteks sosial tertentu. Di sini, teologi praktis dilihat dalam dua arahan secara bersamaan. Yaitu melihat sumber-sumber dari sebuah tradisi keagamaan tertentu dan kemungkinan dari praksis-praksis keagamaan dalam konteks tertentu yang sedang diinvestigasi. Pada poin ini teologi praksis akan masuk kedalam dialog dengan teologia dan etika yang lain, norma-norma praksis akan berkembang tidak hanya merupakan aplikasi dari saran-saran normatif dari bidang ini. Hal itu dikarenakan norma-norma berkembang kedalam konteks tertentu dari praksis. Bagian ini, diinformasikan dari hasil yang telah dilakukan oleh tugas empiris dan interpretatif (Osmer 2004:151). Pengertian normatif ini sebenarnya diperoleh dari tradisi dan kitab suci dan selanjutnya diolah dalam ilmu teologi (Hooijdonk, 1996:34).
- d. Tugas pragmatis adalah untuk menentukan strategi tindakan yang akan memengaruhi situasi dengan cara yang diinginkan dan masuk kedalam percakapan reflektif dengan ke tiga tugas sebelumnya (deskriptif, interpretatif, normatif) (Osmer, 2008:4). Bagian ini memiliki tugas berfokus pada pengembangan peran seni, sebuah konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Friedrich Schleiermacher dalam penjelasannya dalam bidang ini. Aturan-aturan dari seni adalah membuka-mengakhiri petunjuk yang dapat membantu siapa saja yang memimpin atau keterlibatan dalam bentuk tertentu dari praksis agama. Pertanyaan dari bagian ini adalah bagaimana wilayah praksis dapat terbentuk secara penuh menjadi komitmen normatif dari sebuah tradisi agama dalam pengalaman konteks tertentu? Jadi hal ini berfokus pada bagaimana sesuatu bisa terealisasikan. Misalnya, bagaimana kemudian sebuah konseling dapat terstruktur dalam setiap sesi-sesinya? Bagaimana keluarga dapat menyeimbangkan kebutuhan kaum muda dan karier? Bagaimana dapat anggota-anggota dari sebuah komunitas agama mempengaruhi kebijakan-

kebijakan dari pemerintah? Ketika kita mengajukan pertanyaan seperti ini maka akan menjadi jelas bahwa aturan-aturan dari seni adalah bukan seperti yang digunakan dalam mekanik (mesin) atau fusion. (Osmer 2004:151-52).



Gambar 1. 1 Empat Tugas dari Interpretasi Teologi Praktis (Osmer 2008:11)

1.7 Judul

Adapun judul dari penelitian ini adalah:

Vigilantisme, Premanisme dan Teologi Publik: Studi atas Penutupan GKI Pos Palagan Yogyakarta

1.8 Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Pada bagian ini akan dijelaskan: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian, judul dan sistematika penulisan.

Bab II: Teologi Publik & Fenomena Vigilantisme

Pada bagian ini, *pertama-tama* akan dijelaskan mengenai diskursus teologi publik. *Kedua*, akan dijelaskan teologi publik John W. De Gruchy. Pada bagian *ketiga*, akan dijelaskan teologi publik David J. Bosch. Dan pada bagian *keempat*, akan dijelaskan fenomena vigilantisme.

Bab III: Aksi Penutupan Gereja Sebagai Vigilantisme

Pada bagian ini, *pertama*, akan diuraikan secara kronologis aksi penutupan GKI Pos Palagan yang dilakukan oleh FJI. Pada bagian *kedua*, dengan menggunakan perspektif vigilantisme yang sudah dijelaskan pada bab II, peneliti akan melihat apakah aksi penutupan itu merupakan vigilantisme atau tidak. Dan *ketiga*, diskusi akan sedikit diperluas kepada melihat fenomena vigilantisme di Indonesia.

Bab IV: Teologi Publik Kontekstual

Pada bagian ini, *pertama* akan dilakukan tinjauan atas praksis teologi publik GKI Pos Palagan. Kemudian pada bagian *kedua*, peneliti akan menjelaskan teologi publik kontekstual sebagai teologi interkultural. Dan pada bagian terakhir, *ketiga*, peneliti akan melakukan konstruksi teologi publik kontekstual.

Bab V: Penutup

Pada bagian ini, akan diuraikan beberapa kesimpulan, rekomendasi untuk GKI Pos Palagan, keterbatasan penelitian, serta peluang untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

Penutup

5.1 Kesimpulan

GKI Pos Palagan, merupakan pos pelayanan yang secara administrasi berada di bawah GKI Ngupasan. Status gereja ini masih berbentuk pos pelayanan, yang diharapkan akan berkembang menjadi bakal jemaat dan kemudian menjadi jemaat mandiri. GKI Pos Palagan, awalnya merupakan pengembangan tiga gereja yaitu GKI Ngupasan, GKI Gejayan dan GKI Wongsodirjan. Gereja ini sudah dimulai sejak tahun 2006, ibadah selalu berpindah-pindah dan pada tahun 2012, pihak gereja membeli satu ruko di Jl. Nasional no 15 Sinduadi, Sleman. Pada waktu itu, gereja sudah mendapat izin rumah ibadah sementara dari Kelurahan setempat, FKUB dan Depag Kabupaten Sleman sebagaimana tercantum dalam SKB dua Menteri no 08 dan 09 tahun 2006. Namun dalam proses mendapatkan izin tetap rumah ibadah, ada kelompok yang menamakan diri Front Jihat Islam (FJI) dan gabungan beberapa ormas Islam lain di Yogyakarta datang dan melakukan protes atas kegiatan ibadah di GKI Pos Palagan. Mereka menuntut, gereja menghentikan kegiatan ibadah sampai mendapatkan izin tetap pendirian rumah ibadah dari pemerintah.

Aksi penutupan gereja itu terjadi pada 10 Oktober 2015, di saat gereja mengadakan acara sosialisasi kepada masyarakat sekitar, sebagai salah satu persyaratan izin pendirian rumah ibadah. Dalam acara itu, panitia pembangunan gereja mengundang Kyai Abdul Muhaimin yang mewakili NU dan Kyai Zuly Qodir yang mewakili Muhammadiyah sebagai narasumber untuk berbicara mengenai toleransi di Yogyakarta. Puncak aksi penutupan dipicu oleh perdebatan antara kedua Kyai dengan Abdurrahman dari FJI. Perdebatan itu tentang konsep “kafir” dalam Islam. Tidak ada kesepahaman antara kedua Kyai dengan Abdurrahman, akhirnya terjadi debat panas, dan tiba-tiba sudah banyak orang dari FJI datang dan membubarkan acara itu, terdengar suara-suara intimidasi dan ancaman. Akhirnya, mereka meminta gereja tidak boleh beribadah di tempat itu lagi. Ada dua isu yang muncul yaitu penegakan hukum atas gereja yang belum berizin dan ada kecurigaan pembangunan gereja baru merupakan upaya Kristenisasi.

Terhadap pertanyaan *pertama*, yaitu Apa makna di balik aksi penutupan GKI Pos Palagan Yogyakarta? Penulis menemukan bahwa makna di balik aksi itu adalah merupakan “vigilantisme-premanisme” yaitu *establishment violence*: mempertahankan sesuatu dengan menggunakan cara-cara kekerasan untuk melindungi atau mendapatkan

kembali apa yang dimiliki, juga memiliki motif ingin menguasai milik orang lain. Jadi sembari mempertahankan apa yang dimiliki dengan cara kekerasan (*establishment violence*), juga sembari merampas milik orang lain. Aksi “vigilantisme-premanisme” yang dilakukan oleh FJI ini paling tidak dapat dibuktikan dalam 5 hal yaitu: motif dari aksi ini adalah motif ekonomi (pemerasan), oleh karena itu hal ini adalah bentuk premanisme. *Kedua*, aksi ini disebut vigilantisme, karena memiliki unsur perencanaannya (Johnston 1996). *Ketiga*, apa yang dilakukan oleh FJI merupakan vigilantisme karena terjadi kekerasan verbal terhadap jemaat GKI pos Palagan. *Keempat*, bentuk vigilantisme yang dilakukan oleh FJI ini adalah mengambil alih tugas polisi dalam menegakkan hukum, yang sebenarnya bukan menjadi kewenangan mereka. FJI dan kelompok-kelompok Islam lain ini, melakukan vigilantisme dalam kontrol kepada gereja karena mereka menganggap nilai-nilai agama Islam terancam oleh penyebaran orang-orang Kristen di Yogyakarta, dengan munculnya pendirian gereja-gereja baru. Hal ini dianggap sebagai kristenisasi.

Dalam analisis yang lebih luas, vigilantisme yang terjadi di Indonesia dan Yogyakarta, paling tidak dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu, *pertama*, adanya ketidakadilan di masyarakat, sehingga para vigilante berinisiatif melakukan perlawanan terhadap struktur di masyarakat yang tidak adil. Sayangnya, dalam konteks Yogyakarta, upaya melawan struktur yang tidak adil itu, dimanfaatkan oleh para vigilante, menyasar gereja yang belum berizin untuk meminta uang. Inilah vigilantisme yang tumpang tindih dengan premanisme (pemerasan) yang terjadi di GKI Pos Palagan. *Kedua*, vigilantisme bisa terjadi karena bangkitnya konservatisme agama (Islam) yang semakin menguat. Jika kita simpulkan secara keseluruhan, kenapa vigilantisme terjadi di Indonesia dan Yogyakarta karena:

1. Adanya motif ekonomi
2. Adanya ketidaktegasan negara dalam penegakan hukum.
3. Adanya ketidakadilan di masyarakat.
4. Adanya kontrol terhadap kelompok sosial, yang dianggap membahayakan tatanan sosial
5. Bangkitnya Konservatisme agama Islam yang semakin menguat.

Sementara itu, terhadap pertanyaan kedua yaitu bagaimana teologi publik kontekstual di GKI Pos Palagan Yogyakarta? adalah dengan memperkuat *civil society* (keadaban), menyambut orang asing, bergerak dari permusuhan ke hospitalitas dan

membangun dialog kehidupan dengan FJI. *Pertama*, memperkuat *civil society* (keadaban) bertujuan untuk menciptakan masyarakat sipil yang berakar pada nilai-nilai Kerajaan Allah yaitu kemanusiaan dan kesetaraan dalam demokrasi, serta mendorong komunitas agama-agama untuk lebih pro aktif, tidak hanya tataran “dialog wacana”, tetapi juga terlibat pada tataran “dialog kehidupan”. Dalam “dialog kehidupan” itu, nilai-nilai pluralitas, kesetaraan, tanpa kekerasan, tanpa diskriminasi, keadilan, damai dan keutuhan ciptaan dapat ditaburkan dan dituai dalam masyarakat dan bangsa yang plural ini. Selain itu, penguatan *civile society* juga merupakan upaya mewujudkan keadilan ekonomi di masyarakat dengan melawan struktur penindasan yang ada di masyarakat dan dengan diakonia *transformatif*. walaupun upaya *diakonia transformatif*, tidak mudah, bukan berarti gereja meninggalkan *diakonia karitatif*. Gereja sebaiknya menjalankan *diakonia karitatif*, jangan hanya karena mencita-citakan sebuah *diakonia transformatif*, lalu tugas gereja untuk memberikan perhatian terhadap korban-korban diabaikan

Kedua, menyambut orang asing dengan sikap hospitalitas. Menjadi gereja yang inklusif adalah gereja yang menyambut orang asing. Menyambut orang asing dan menerima fakta akan keberagaman menjadi penting dalam berteologi publik. Orang asing tidak hanya seseorang yang belum pernah kita jumpai sebelumnya, tetapi juga seseorang yang kita kenal tetapi dianggap orang luar. Anggota keluarga dari orang-orang Kristen dalam jemaat lokal dapat menjadi orang asing untuk kita. Penghormatan terhadap orang lain, dan yang dimasukkan yaitu orang asing adalah praktik integral untuk pemahaman Amos Yong tentang ruang publik yang inklusif dalam hospitalitas/keramahmatan, yang bagi Bosch merupakan paradigma melakukan misi dan bagi mereka yang melakukan teologi publik dengan cara ini dalam konteks-konteks yang ada. Sikap hospitalitas ini merupakan sikap di mana gereja memahami dirinya berada “di dalam” tetapi tidak “dari” dunia. Sikap itu dapat ditunjukkan melalui lima gerak tari yaitu: Mendengar (*listening*), menerjemahkan (*interpreting*), penilaian secara bijaksana (*discerning*), gereja liminal (*liminal church*), gereja transformasional (*transformational church*).

Ketiga, perpindahan dari sikap permusuhan ke hospitalitas (*from hostility to hospitality*). Perpindahan ini merupakan gerakan yang berkelanjutan dari perpindahan pertama yaitu perpindahan dari kesepian ke kesendirian (*from loneliness to solitude*). Ketika pada tahap pertama terjadi perubahan dalam diri kita sendiri, maka dapat mengubah hubungan kita dengan sesama manusia. Kita menjangkau bagian terdalam kita, mengarah pada menjangkau banyak orang asing yang kita temui dalam perjalanan

hidup kita. Hal itu akan menjangkau dunia yang penuh dengan orang asing, terasing dari masa lalu mereka, budaya dan negara mereka sendiri, dari tetangga, teman dan keluarga, dari diri mereka yang terdalam dan Tuhan mereka. Pencarian tempat yang ramah di mana hidup bisa dijalani tanpa rasa takut dan komunitas bisa ditemukan. Adalah mungkin bagi pria dan wanita dan wajib bagi orang Kristen untuk menawarkan ruang keterbukaan dan hospitalitas di mana orang asing dapat merasa tidak asing lagi dan kita menjadi sesama manusia.

Dan terakhir, *keempat*, membangun dialog kehidupan (*dialogue of life*) dengan kelompok vigilantisme, bukan sekadar dialog wacana. Dialog mesti melangkah lebih jauh untuk berdialog dengan ormas-ormas islam seperti FJI, FPI dan FUI serta lainnya. Jika selama ini, gereja sudah berdialog dengan kelompok-kelompok moderat, yang walaupun itu baik juga, namun keberanian untuk berdialog dengan mereka yang selama ini menjadi sumber persoalan perlu diupayakan. Tentu dialog yang dilaksanakan adalah dialog setara. Ormas-ormas itu perlu didengar suaranya, bersama-sama dengan gereja untuk mencari jalan keluar atas persoalan di masyarakat termasuk keadilan ekonomi. Dengan demikian, teologi publik dapat operasional dalam dialog, yang pada gilirannya menghasilkan transformasi bagi masih-masih pihak yang berdialog (baik gereja maupun ormas-ormas Islam). Dialog kehidupan itu misalnya dapat kita temukan dalam konsep *konvivenz*, yaitu memiliki pengertian dasar tentang “hidup bersama” dalam hubungan bertetangga. tiga karakter penting dari *konvivenz* itu, adalah: gotong royong (*gegenseitige Hilfe*), belajar (*Lernen*) dan perayaan (*Feiern*), di mana semua dilakukan secara bersama-sama dan selalu dalam pengertian “saling”, hubungan ketiganya bersifat konstitutiv. Melalui dialog ini diharapkan menghasilkan kerjasama yang baik antara gereja dan kelompok vigilantisme seperti FJI untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat, misalnya bersama-sama menolong korban bencana alam, mengatasi masalah-masalah sosial-kemanusiaan lainnya.

5.2. Rekomendasi

Ada beberapa rekomendasi kepada Gereja-gereja di Yogyakarta dan juga pihak GKI Pos Palagan :

1. Menaruh perhatian pada isu-isu publik kontemporer yang berhubungan dengan hubungan antar agama dan masalah-masalah sosial lainnya di Yogyakarta.
2. Meningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan dan kelompok masyarakat lain, bukan saja lembaga-lembaga keagamaan saja, tetapi semua

komunitas. Hal ini bukan saja untuk kepentingan gereja semata, tetapi untuk kepentingan kemanusiaan. Kerjasama ini bertujuan untuk membangun *civil society* (keadaban) sesuai dengan nilai-nilai Kerajaan Allah.

3. Berani membuka ruang-ruang dan kanal-kanal komunikasi melalui dialog kehidupan dengan kelompok-kelompok vigilantisme seperti FJI, FPI, FUI dan lainnya dalam dialog yang setara. Dialog itu, dimungkinkan untuk menjawab berbagai persoalan di masyarakat seperti ketidakadilan, kemiskinan dan lain-lain.
4. Berupaya melakukan *diakonia transformatif*, tanpa harus meninggalkan *diakonia karitatif* yang sudah dijalankan selama ini.
5. Mempersiapkan jemaat untuk memiliki spiritualitas menyambut orang asing dan mengubah permusuhan ke hospitalitas melalui kegiatan-kegiatan konkret di masyarakat.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yaitu, penelitian ini belum dapat berdialog secara intensif dengan kelompok-kelompok vigilantisme yang ada di Yogyakarta seperti FJI. Penelitian ini hanya berasal dari satu sisi, yaitu dari pihak gereja, karena kesulitan peneliti untuk mewawancarai orang-orang yang berafiliasi dengan FJI dan kelompok-kelompok Islam lain, yang seringkali melakukan penutupan gereja di Yogyakarta.

5.4. Peluang untuk Penelitian Selanjutnya

Peluang untuk penelitian-penelitian selanjutnya adalah memeriksa secara mendalam praktik-praktik teologi publik dalam kehidupan praksis jemaat, terkait dengan implementasi nilai-nilai Kerajaan Allah di ruang publik atau dalam kehidupan masyarakat majemuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrahams, R. (1998). *Vigilant Citizens: Vigilantism and the State*. New York: Polity.
- Adiprasetya, J. (2013, April). In Search of a Christian Public Theology in the Indonesia Context Today. dalam *Diskursus: Jurnal Filsafat dan Teologi*, 12 No 1, 103-124.
- Ahnaf, M. I., & Salim, H. (2017). *Krisis Keistimewaan: Kekerasan Terhadap Minoritas di Yogyakarta*. Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies).
- Amaladoss, M. (2002). Mission in Asia: A Reflection on Ecclesia in Aisia. Dalam P. C. Phan, *The Asia Synod - Texts and Commentaries* (hal. 223-235). New York: Orbis Books.
- Amaladoss, M. (2011). Pluralisme Agama-agama dan Makna Kristus. Dalam R. S. Sugirtharajah, *Wajah Yesus di Asia* (hal. 137-166). Jakarta: Gunung Mulia.
- Ardiyanti, H. (2012). Konflik Sampang: Sebuah Pendekatan Sosiologi-Komunikasi. *Politica*, 3(2), 225-241.
- Bagir, Z. A. (2014). Advocacy For Religious Freedom In Democratizing Indonesia. *The Review of Faith & International Affairs*, dalam *Institute for Global Engagement*, <http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=rfa20>.
- Bagir, Z. A. (2014). Pentecostal-Muslim Relations in Indonesia: Indifference, Potential for Conflict and Prospects for Harmoni. Dalam Z. A. (Ed), *Aspiration for Modernity and Prosperity: Symbols and Sources Behind Pentecostal/ Charismatic Growth in Indonesia*. Australia: ATF Press.
- Bakker, L. (2015). Illegality for the General good? Vigilantism and Social Responsibility in Contemporary Indonesia. *Critique of Antropology*, 35 no 1, 78-93.
- Bedford-Strohm, H. (2017). Public Theology and Interreligious Dialogue. *International Journal of Public Theology*, 11 No 3, 301-312.
- Bevans, S. B & Schroeder R. P (2011). *Prophetic Dialogue*. Maryknoll, NY: Orbis.
- Bevans S. B. & Schroeder R. P. (2006). *Terus Berubah-Tetap Setia (diterjemahkan: Yosef Maria Florisan)*. Maumere: Ledalero.
- Bezuidenhout, R. M. (2007). *Re-Imagining Life: A Reflection on "public theology" in the work of Linell Cady, Denise Ackermann, and Etienne de Villiers*. Port Elizabeth: Nelson Mandela Metropolitan University.
- Bosch, D. J (1975). The Church as the "Alternative Community". *Journal of Theology*, 13, 3-11.
- Bosch, D. J. (1979). *Heil vir die Wêreld: Die christelike sending in teologiese perspektief*. Pretoria: N.G. Kerk-Boekhandel.
- Bosch, D. J. (1980). *Witness to the World: The Christian Mission in Theological Perspective*. Atlanta: John Knox Press.

- Bosch, D. J. (1982a, December). How my mind has changed: Mission and the alternative community. *Journal of Theology for Southern Africa*, 14, 6-10.
- Bosch, D. J. (1982b). *The Church as Alternative Community*. Published Lecture delivered at Potchefstroom University.
- Bosch, D. J. (1982c). *The Scope of Mission*. London: Church Missionary Society.
- Bosch, D. J. (1995). *Believing in the Future: Toward a Missiology of Western Culture*. Valley Forge: Trinity Press International.
- Bradstock, A & Russell, H (2017). Politics, Church and the Common Good. Dalam Kim. S & Day. K (Ed), *A Companion to Public Theology* (hal. 164-183). Leiden, The Netherlands: Koninklijke Brill NV.
- Bretenberg, E. H. (2003). To Tell The Truth: Will The Real Public Theology Please stand Up? *Journal of Society of Christian Ethics*, 55-96.
- Bromell, D. J. (2011, May). *What_is_public_theology*. Diambil kembali dari https://www.researchgate.net/publication/289129237_What_is_public_theology
- Burke, R. H. (2014). *An introduction to criminological theory (4th ed.)*. Oxford, England: Routledge.
- Burrows, W. E. (1976). *Vigilante*. New York: Houghton Mifflin Harcourt P.
- Button, M. (2002). *Private Policing*. Portland: OR: Willan Publishing.
- Buur, L., & Jensen, S. (2004). Introduction: Vigilantism and the Policing of Everyday Life in South Africa. *African Studies*, 63, no. 2, 139–152.
- Christiani, T. K. (2009). Sejarah GKI Ngupasan 75 th. *GKI Ngupasan* .
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design*. California: SAGE Publications Ltd.
- De Gruchy, J. W. (1986). *The Church Struggle in South Africa*. Grand Rapids: Eerdmans.
- De Gruchy, J. W. (1986a). *Cry Justice! Prayers, meditations and readings from South Africa*. London: Collins.
- De Gruchy, J. W. (1994). *Doing theology in context: South African perspectives*. Maryknoll: Orbis Books.
- De Gruchy, J. W. (2004). *The Church Struggle in South Africa*. Minneapolis: Fortress Press.
- De Gruchy, J. W. (2006). *Being Human. Confessions of a Christian Humanist*. London: SCM Press.
- De Gruchy, J. W. (2007). Public Theology as Christian Witness: Exploring the Genre. *International Journal of Public Theology* 1.

- De Gruchy, J. W. (2007, January 1). Public Theology as Christian Witness: Exploring the Genre,” *International Journal of Public Theology*. *International Journal of Public Theology*, 1 No 1, 26-41.
- De Jong, K. (2006). Hidup Rukun Sebagai Orang Kristen Spiritualis Dari Segi Theologia Religionum. *Jurnal Gema Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana*, 30 No 2, 1-12.
- De Jong, K. (2010). Hospitalitas Sebagai Dasar Hubungan Antar Islam-Kristen, Menjadi Agama Yang Ramah Dan Bersahabat-Pekabaran Injil dalam Konteks Masyarakat Multikultural Pluralistik. Dalam G. A. Hendri Wijayatsih, *Memahami Kebenaran – Yang Lain – Sebagai Upaya Pembaharuan Hidup Bersama*. Yogyakarta: UKDW- TPK- Mission 21.
- De Jong, K. (2015). Teologi (Misi) Interkultural. Dalam De Jong, K & Tridarmanto, Y (Ed), *Teologi dalam Silang Budaya*. Yogyakarta: YTPKI – PPS UKDW.
- Dumday, T. (2009). On Cheering Charles Bronson: The Ethics of Vigilantism. *The Southern Journal of Philosophy*, 47 No 1, 49-67.
- Forrester, D. (2004, August). The Scope of Public Theology. *Studies in Christian Ethics*, 17 No 02, 5-19.
- Francis, D. J. (2005). *Civil Militia. Africa’s Intractable Security Menace?* Ashgate.
- Gaffar, A. (1999). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Gallagher, R. A. (1999, 2011). From hostility to hospitality: Quotes are from Reacing out by Hendri Nouwen.
- Gutiérrez, G. (1973). *A Theology of Liberation. History, Politics and Salvation*. Maryknoll-New York: Orbis Books.
- Haas, N. E. (2010). *Public Support For Vigilantism*. Leiden, Holland: Doctoral Thesis, Leiden University.
- Habermas, J. (2002). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois*. Cambridge, Massachusetts, and London, England: MIT Press.
- Hadiwitanto, H. (2017). Agama dan Rasa Percaya yang Terbuka dalam Masyarakat- Sebuah tinjauan empiris-teologis. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian bagi Civitas Akademika UKDW*, 45-78.
- Haire, J. (2007). Public Theology — A Purely Western Issue? Public Theology in the Praxis of the Church in Asia. *Article Ferguson Lecture in Auckland*, 46-61.
- Hakim, L. N. (2011). Tindak Kekerasan Terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia: Sebuah Kajian Psikologi Sosial. *Aspirasi*, 2(1), 17-30.
- Hardiman, F. B. (2009). *Demokrasi Deliberatif*. Yogyakarta: Kanisius.

- Hauerwas, S & Willimon, W. H (1989). *Resident Aliens, Life in the Christian Colony 3rd*. Nashville: Abingdon Press.
- Hershberger, M. (1999). *A Christian view of hospitality: expecting surprises*. Canada: Herald press.
- Hikam, M. AS (1996). *Demokrasi Dan Civil Society*. Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES.
- Hill, A. (1999). *Vigilant Citizens: Vigilantism and the State*. Malde: Polity Press.
- Hooijdonk, P. V. (1996). *Batu-Batu Yang Hidup, Pengantar Kedalam Pembangunan Jemaat*. Jakarta-Yogyakarta: BPK-Kanisius.
- Holness, L & Wustenberg, R.K (Ed). (2002). *Theology in Dialogue: The impact of the Arts, Humanities, & Science on Contemporary Religious Thought*. Grand Rapids: William B Eerdmans Publishing Company.
- Jacobsen, E. (2012). Models of Public Theology. *International Journal of Public Theology*, 6, 7-22.
- Jarman, N. (2007). Vigilantism, Transition, and Legitimacy: Informal Policing in Northern Ireland. Dalam D. P. (ed), *Global Vigilantes: Anthropological Perspectives on Justice and Violence* (hal. 319-348). London: Hurst.
- Johnston, L. (1996, March 20). What is Vigilante? *British Journal of Criminology*, 36 no 2, 220-236.
- Kim, S. (2011). *Theology in the Public Sphere: Public Theology as a Catalyst for Open Debate*. London: SCM.
- Kim, S. (2017). Mission's Public Engagement: The Conversation of Missiology and Public Theology. *Saga*, 45(1), 7-24.
- Kopel, D. B. (2014). The 'Posse Comitatus' and the Office of Sheriff: Armed Citizens Summoned to the Aid of Law Enforcement. *The Journal of Criminal Law and Criminology*, 104 No 4, 761-850.
- Kotecha, K. C & Walker, J. L. (1976). Police Vigilantism. *Society*, 13 No 3, 48-52.
- Kucera, M & Mares, M. (2015). Vigilantism during Democratic Transition. *Policing and Society*, 25 No 2, 170-187.
- Livingston, K. (1990). *David Bosch: An Interpretation of some Main Themes in his Missiological Thought in Mission in Creative Tension: A Dialogue with David Bosch*. Pretoria: S A Missiological Society.
- Mannion, G. (2009). A Brief Genealogy of Public Theology, or, Doing Theology when it Seems Nobody is Listening. *Ku Leuven*, 10, 122-152.
- Marshall, C. (2005). What language shall I borrow?: The Bilingual Dilemma of Public. *Stimulus*, 13 No 3, 11-18.
- Martin, J. (2012). Vigilantism and state crime in South Africa. *State Crime Journal*, 1(2), 217-234.

- Mee, C. Y, Sairin, S, Abdullah, I (2015, Februari). Kekerasan Vigilantisme Dalam Tatanan Sosial: Sebuah Usulan Kerangka Analisis Kekerasan Dari Kasus Amerika, Afrika, dan Indonesia. *Jurnal Humaniora, Volume 17*(No 1).
- Menoh, G. A. (2015). *Agama Dalam Ruang Publik: Hubungan Antar Agama dan Negara Dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jurgen Habermas*. Yogyakarta: kanisius.
- Meylahn, J.A. (2011, April). Transforming mission, twenty years later: Paradigm shift or cosmetic facelift? hal. 130-151.
- Mireanu, M. (2014). *Vigilantism and security: State, violence and politics in Italy and Hungary*. Budapest, Hungary: Doctoral Dissertation.
- Moltmann, J. (1997). *The Church in the Power of the Spirit: A Contribution to Messianic Ecclesiology*. London: SCM Pres.
- Moltmann, J. (2000). *Experiences in Theology*. Philadelphia: Fortress Press.
- Monaghan, R. (2004). An imperfect Peace’: Paramilitary “Punishments. *Terrorism and Political Violence, 16:3*, 439-461.
- Morton, W. S.-A. (2004). *Public Theology for the Twenty-First Century: Essays*. London.
- Nicol, W. (1993). David Bosch's role in Church and Society - The Messenger of Reconciliation and Peace. *REC Mission Bulletin, XIII, No 4*.
- Niles, P. D. (1983). A Suffering People Called to be Suffering Servant - The Political Vision Of Second Isaiiah. Dalam P. D. Niles, *Towards The Sovereignty of the People : A Search for an Alternative Form of Democratic Politics in Asia - Christian Discussion* (hal. 44). Singapore: CTC - CCA.
- Niles, P. D. (2013). *The Lotus and the Sun: Asian Theology Engagement with Plurality and Power*. Australia: Barton Book.
- Nouwen, H. J. (1975). *Reaching Out: The Three Movements of the Spiritual life*. USA: Dorton, Longman & Todd, Ltd., and Doubleday & Company, Inc.
- Nussbaum, S. (2005). *A Reader's Guiden to Transforming Mission*. Maryknoll, New York: Orbis Books.
- Osmer, R. R. (2004). Johannes Van der ver’s Contribution to The New Consensus in Practical Theology. Dalam M. (. Chris A.M Hermas & Mary E, *Hermeneutics and Empirical Reasearch in Practical Theology* (hal. 149-167). Liden-Boston: Brill.
- Osmer, R. R. (2008). *Practical Theology-An Introductions* . Grand Rapids, Michigan: Wn. B Eerdmans Publishing Co.
- Paeth, S. R. (2005). Jürgen Moltmann’s Public Theology. *Political Theology, 215-234*.
- Parmudi, M. (2015). Kebangkitan Civil Society Di Indonesia. *Jurnal at-Taqaddum, 7* (2).

- Pattipeilohy, S. Y. (2018). *Teologi Publik Menurut Preman Niles dan Relevansinya Bagi Konstuksi Teologi Publik Kristiani di GPIB*. Yogyakarta: Tesis Pasca Sarjana (S2) Fakultas Teologi Univeristas Kristen Duta Wacana.
- Pedahzur, A., & Perliger, A. (2003). The Causes of Vigilante Political Violence: The Case of Jewish Settlers. *Civil Wars*, 6 No 3, 9-30.
- Peters, T. (2018). Public Theology: Its Pastoral, Apologetic, Scientific, Political, and Prophetic Tasks. *International Journal of Public Theology* 12, 153–177.
- Pieris, A. (1980). Towards an Asia Theology of Liberation: Religion-cultural Guidelines, dalam T. T. D. Preman Niles, *Varieties of Witness* (hal. 21-42). Singapore: Christian Conference of Asia.
- Pieris, A. (1996). *Berteologi Dalam Konteks Asia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Prasetyo D. A. W (2008). "Konvivenz" dan Theologia Misi Interkultural Menurut Theo Sundermeier. *Gema Teologi: jurnal Fakultas Theologia*, 32(1). 97-115
- Rahmat, J. (2007). *SQ FOR KIDS: Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Anak Sejak Dini*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Rakhmad, J. (2011). Benarkah Agama Menyebabkan Tindakan Kekerasan? Prisma: Demokrasi Yang Dibajak – Perselingkuhan Negara, Fundamentalisme Pasar dan Agama. *LP3ES*.
- Robbins, I. P. (2016). Vilifying the Vigilante: A Narrowed Scope of Citizen's Arres. *Cornell Journal of Law and Public Policy*, 25 No 3, 557-599.
- Robinson, R. (2013). Asian Public Theology: A sociological perspective. *Jeevadhara: A journal for socio-religious research*, 43, 5-15.
- Rosenbaum, J. H & Sederberg, P. C. (1974). Vigilantism: An Analysis of Establishment Violence. Dalam J. Rosenbaum, & P. C. Sederberg, *Vigilante Politics* (hal. 3–30). Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Scheper-Hughes. (2006). Death Squads and Democracy in Northeast Brazil. Dalam J. a. (Ed), *Law and Order in the Postcolony* (hal. 150-187). Chicago: University of Chicago Press.
- Silke, A. (2000). The Impact of Paramilitary Vigilantism on Victims and Communities in Northern Ireland. *The International Journal of Human Rights*, 4 No 1, 1-24.
- Singgih, E. G. (2002). *Iman & Politik dalam era Reformasi di Indonesia*. Jakarta: Gubung Mulia.
- Singgih, E. G. (2005). *Mengantisipasi Masa Depan: Berteologi dalam Konteks di Awal Melenium III*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Singgih, E. G. (2019). What Has Ahok to Do with Santa? Contemporary Christian and Muslim Public Theologies in Indonesia. *International Journal of Public Theology*, 13, 25–39.

- Sluka, J. A. (2000). *Death Squad: The Anthropology of State Terror. The Ethnography of Political Violence*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Smith, D. J. (2004). The Bakassi Boys: Vigilantism, violence, and political imagination in Nigeria. *Cultural Anthropology*, 19(3), 429-455.
- Sprinzak, E. (2001). From Messianic Pioneering to Vigilante Terrorism: The Case of the Gush Emunim Underground. Dalam D. C. Rapoport, *Inside Terrorist Organizations* (hal. 194-217). Portland: OR: Frank Cass Publishers.
- Storrar, W. (2007). A Kairos Moment for Public Theology. *International Journal of Public Theology*, 1 No 1, 5-52.
- Storrar, W. (2011). The Naming of Parts: Doing Public Theology in a Global Era. *International Journal of Public Theology*, 5, 23-43.
- Stone, L. M. (2016). *An Eye for an Eye: Examining Public Support for Vigilante Behaviour*. Thesis at The School of Social Sciences and Public Policy.
- Sutikno, R. B. (2010). *The Power 4q For HR And Company Development*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tankebe, J. (2009). Self-Help, Policing, and Procedural Justice: Ghanaian Vigilantism and the Rule of Law. *Law & Society*, 42 No 2, 245-270.
- Tracy, D. (1975). *Blessed Rage for Order, the New Pluralism in Theology*. New York: Seabury.
- Tracy, D. (1981). *The Analogical Imagination: Christian Theology and the Culture of Pluralism*. New York: Crossroad.
- Tracy, D. (1989). Afterword: Theology, Public Discourse, and the American Tradition. Dalam M. J. (Ed), *Religion and Twentieth-Century American Intellectual Life*. Washington, D.C., Cambridge, England & New York: Cambridge University Press.
- White, B. (1883). *From Conflict to Violence: The Re-emergence of the IRA and the Loyalist Response*, in 'Northern Ireland. The Background to Conflict'. Appletree Press.
- Wilfred, F. (2013). On The Future of Asia Theology: Public Theologizing. *Jeevadhara*, XLIII, no 253.
- Wilson, I. (2014). Morality Racketeering: Vigilantism and Populist Islamic Militancy in Indonesia. Dalam H. d. Teik, *Between Dissent and Power: The Transformation of Islamic Politics in the Middle East and Asia* (hal. 249). Palgrave Macmillan.
- Worsley, H. J. (2018). Mission as public Theology: Bridging the Worlds of Mission and Religious Education (RE) in Church of England schools. *Missiology: An International Review*, Vol. 46(2) , 171-182.

Wyngaard, G. J. (2008). *The public theology of David J. Bosch: The public role of the Christian community*, Pretoria : A mini-dissertation at Faculty of Theology University of Pretoria .

Yewanggoe, A. A. (2004). *Gereja-gereja Menyongsong SR XIV PGI*. 26 November: dalam Harian Suara Pembaharuan.

Yewanggoe, A. A. (2009). *Tidak Ada Penumpang Gelap: Warga Gereja, Warga Bangsa*. Jakarta: Biro Penelitian dan Komunikasi PGI dan PT BPK Gunung Mulia.

Yong, A. (2008). *Hospitality dan The Other-Pentecost, Christien Practices and The Neighbor*. NY: Orbis Books.

Zabyelina, Y. (2019). Vigilante justice and informal policing in post-Euromaidan. *Post-Soviet Affairs*, 1-16.

©UKPDW